

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERTAHANAN WILAYAH PERBATASAN PENDEKATAN *HUMAN SECURITY* DALAM RANGKA Mendukung KETAHANAN WILAYAH KECAMATAN ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rahman

Universitas Pertahanan Indonesia
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Email: rhnmadia@gmail.com

ABSTRACT

This paper explained the optimization of institutional defense in Entikong. The qualitative data showed the defense establishment in regional border Entikong had not yet maximum due the lack of supervision on some remote areas, lack of order on freight traffic and the people who used traditional roads and also the lack of community involvement in regional resilience. There were also the lacks of basic facilities and infrastructures (transportation, electricity, clean water, and telecommunication), Indonesian people at border region economic dependency on Malaysia, the lack human resources quality and non-military defense software.

Keywords: Defense Establishment, Human Security, and Regional Resilience.

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan seputar optimalisasi kelembagaan pertahanan di Entikong. Dengan menggunakan data kualitatif, makalah ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pertahanan di wilayah perbatasan Entikong belum maksimal yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap beberapa daerah terpencil, belum tertibnya lalu lintas barang dan orang melalui jalan jalan tradisional dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam pertahanan wilayah. Ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan sarana prasarana dasar (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), ketergantungan ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan terhadap Malaysia, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan piranti lunak tentang pertahanan non-militer.

Kata Kunci: Penyelenggaran Pertahanan, Keamanan Manusia, dan Ketahanan Wilayah.

PENGANTAR

Optimalisasi penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja kelembagaan pertahanan nonmiliter dengan strategi pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar untuk mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah

batas. Guna pembangunan ekonomi untuk meminimalisasi ketergantungan ekonomi, perlindungan terhadap keamanan pribadi dan masyarakat dari tindak kejahatan dan kegiatan illegal, pengamanan serta pelestarian lingkungan, dan pembinaan stabilitas politik melalui pembinaan nasionalisme

serta kesadaran bela negara (Simbolon, 2009). Strategi pembangunan tersebut di atas memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan wilayah, berupa peningkatan sikap nasionalisme masyarakat perbatasan Entikong, peningkatan pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan serta terpeliharanya keharmonisan dalam kehidupan sosial budaya dan toleransi beragama (Armawi, 2011).

Oleh karena itu, sebagai saran strategi pertahanan di wilayah perbatasan ke depan agar dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dasar (jalan darat paralel perbatasan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pembangunan Entikong sebagai *border development centre*, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan penyempurnaan piranti lunak tentang pertahanan non-militer oleh pemerintah daerah.

Masyarakat Indonesia di perbatasan Entikong dihadapkan pada suatu kondisi keterbatasan infrastruktur dasar dan ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka memanfaatkan infrastruktur dasar dan sarana perekonomian di negara tetangga. Sehubungan dengan itu sebagai implikasi dari berbagai masalah sosial ekonomi yang terjadi di kawasan perbatasan membuat penduduk di kawasan perbatasan memiliki suatu pandangan bahwa mereka memiliki hubungan sosial ekonomi yang lebih rapat dengan masyarakat negara tetangga di kawasan perbatasan dibandingkan dengan pusat pemerintahan yang jauh dari kawasan mereka. Hal inilah yang menghasilkan perasaan lemah dalam hal rasa memiliki (*feel of belonging*) dan penghayatan identitas nasional (*internalization of national identity*) (Rahmaniah, 2009: 1).

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan seperti terorisme, penyelundupan, *illegal logging*, *human trafficking*, *illegal trading*, deforestasi dan degradasi hutan, kesenjangan ekonomi, dan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pertahanan wilayah perbatasan melalui pendekatan human security untuk memperkokoh ketahanan wilayah perbatasan, dengan menitikberatkan pada pola pertahanan non-militer yang dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat sipil agar memiliki keuletan dan ketangguhan yang dapat digunakan sebagai benteng yang kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang bersifat ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya (Rahmawati, 2010; Basri, 2008).

PEMBAHASAN

Lembaga Penyelenggara Pertahanan Wilayah Perbatasan

Lembaga pertahanan di daerah terdiri dari unsur militer, kepolisian, dan pemerintah daerah yang saling melengkapi dan berkoordinasi, yaitu

Pertama, unsur kodim 1204/Sanggau yang terdiri dari Koramil 120421/Entikong dan Unit Intel Kodim1204.

Kedua, unsur pemerintah daerah Kabupaten Sanggau terdiri dari pemerintah Kecamatan Entikong, Dinas/ badan pelaksana tugas daerah, dan Badan pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau.

Ketiga, unsur polres Sanggau terdiri dari Polsek Entikong dan unit reskrim Polres Sanggau.

Kempat, satuan tugas pengamanan perbatasan (Pamtas). *Kelima*, unsur unsur

kelembagaan tersebut didukung oleh dinas instansi pusat di Entikong yaitu Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Entikong, Kantor Imigrasi Entikong, Kantor Stasiun Karantina Ikan Entikong, Kantor Stasiun Karantina Pertanian Entikong, Kantor Karantina Kesehatan Entikong, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Entikong (UP3LB), Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Entikong, Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Entikong.

Kondisi Penyelenggaraan Pertahanan Wilayah Perbatasan

Implementasi pelaksanaan peran Pemda Kabupaten Sanggau dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi pembangunan sarana prasarana pendukung pertahanan untuk memudahkan pengawasan wilayah serta distribusi pasukan dan logistik masih terbatas, demikian juga sarana prasarana komunikasi masih terbatas.

Implementasi penyiapan kekuatan cadangan dan pendukung melalui penyiapan pembinaan rakyat terlatih, perlawanan rakyat, pembinaan kesadaran bela negara, dan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara, belum berjalan sesuai dengan amanat undang undang pertahanan Nomor 3 tahun 2002.

Implementasi pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan geografi baik untuk kepentingan pertahanan maupun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat belum maksimal dalam hal ini belum ada penataan dan pengawasan yang tegas dalam pemanfaatan lahan, sejauh ini pemanfaatan lahan oleh masyarakat dilakukan secara berpidah-

pindah, masih ada lahan yang ditinggalkan dalam keadaan gundul dan hal ini menjadi ancaman terjadinya erosi dan banjir dan merugikan aspek pertahanan. Oleh karena itu, masih diperlukan perhatian dari *stakeholders* pertahanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan.

Dalam rangka kegiatan pembangunan dan pembinaan daya tangkal, Kodim 1204/ SGU melaksanakan kegiatan program pembinaan ketahanan wilayah yang meliputi pendataan potensi SDA, SDB dan SDM serta sarana prasarana untuk diberdayakan dalam rangka ketahanan wilayah, pembinaan terhadap warga masyarakat dengan mendata ulang terhadap organisasi ketahanan wilayah untuk menjadikan wilayah mandiri yang mengandung aspek ketahanan nasional, pembinaan terhadap mitra karib sebagai jaring intelejen dan mitra Babinsa dalam rangka mendukung tugas pokok di wilayah, pembekalan kepada unsur komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan, dan wawasan kebangsaan serta masalah bela negara, mengajak dan menghimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pengamanan swakarsa serta kepedulian terhadap lingkungan dan perkembangan wilayah.

Dalam rangka diplomasi pihak RI dan Malaysia, kerjasama dilaksanakan oleh pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Serawak dengan membentuk Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK Sosek-Malindo). KK Sosek Malindo melakukan pertemuan satu tahun sekali untuk membahas persoalan kedua negara yang menyangkut kerjasama ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan,

Perhubungan, pariwisata, investasi, tenaga kerja, kehutanan dan lingkungan hidup, pencegahan penyeludupan, pengurusan tapal batas dan infrastruktur perbatasan (Widarto, 2012: Wahyudi, 2009).

Dalam rangka penanggulangan ancaman, penyelenggaraan pertahanan dihadapkan pada jenis ancaman yang dihadapi yaitu ancaman terhadap: *Pertama*, keamanan ekonomi, penyelenggaraan pertahanan di wilayah perbatasan Entikong dihadapkan pada ancaman ekonomi seperti *illegal trading*, *illegal logging*, pengiriman tenaga kerja illegal, terutama yang dilakukan oleh aktor-aktor di luar negara seperti, perusahaan, jaringan pemasok tenaga kerja merupakan bagian dari isu-isu keamanan ekonomi. Transaksi perdagangan melalui jalan tradisional menimbulkan kerugian sumber daya alam, sumber daya hutan, produksi pertanian dan potensi ekonomi lainnya yang dijual ke Malaysia dengan harga relatif lebih murah tanpa pungutan pajak, bea cukai, dan pungutan lainnya. Untuk menghadapi ancaman tersebut satuan TNI (BAIS, Inteldam, dan unit intel Kodim) bekerjasama dengan unsur intelejen negara Malaysia melakukan operasi intelejen dalam pertukaran informasi pengawasan kegiatan illegal di daerah perbatasan. Di samping itu, Polsek Entikong bekerjasama dengan instansi bea dan cukai, Imigrasi, karangtina dan perhubungan melaksanakan upaya mencegah penyeludupan, illegal trading, dan illegal logging, melalui pemantauan dan penegakan hukum lalu lintas orang dan barang, namun masih saja ditemukan kasus-kasus penyeludupan barang baik berasal dari dalam maupun luar negeri. pada tahun 2010 terdapat lima kasus penyeludupan barang, Pada tahun 2011 terdapat lima kali penangkapan kayu

yang tidak berdokumen yang diperkirakan merupakan hasil *illegal logging*.

Kedua, keamanan pangan, penyelenggaraan pertahanan di wilayah Entikong dihadapkan pada ketergantungan akan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok selain hasil pertanian dari Malaysia terutama di desa-desa terpencil. Kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, garam, bawang merah (*Allium cepa*), gas, pada umumnya berasal dari Malaysia, harga yang lebih murah mendorong masyarakat untuk menggunakan barang-barang dari Malaysia. Dalam kondisi seperti ini sulit bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan pengendalian harga yang terjangkau oleh masyarakat karena harga ditentukan oleh pedagang dari Malaysia.

Ketiga, keamanan kesehatan. Wilayah perbatasan Entikong sebagai pintu masuk orang dan barang dari negara asing ke Indonesia, memungkinkan menjadi pintu masuknya obat-obat terlarang dan wabah penyakit menular yang berasal dari luar negeri seperti HIV dan malaria, baik melalui pintu resmi maupun melalui jalan tradisional yang tidak terjaga. Menghadapi ancaman tersebut Dinas kesehatan dan Polres Sanggau kepada masyarakat agar memahami akibat penggunaan obat-obat terlarang dan bahaya penularan penyakit berbahaya. Di samping itu, pemeriksaan dan sterilisasi dilakukan oleh pihak Kantor Karangtina Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di PPLB Entikong. Penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang juga merambah Entikong, dengan adanya satu kasus narkoba yang ditemukan oleh Polsek Entikong pada tahun 2010 dan 2011, serta penangkapan penyeludupan narkoba melalui PPLB Entikong pada bulan Maret 2012.

Keempat, keamanan lingkungan, penyelenggaraan pertahanan di wilayah perbatasan dihadapkan pada penegakkan kedaulatan batas negara, pengamanan patok tanda batas negara, pengamanan wilayah dari eksplorasi yang berlebihan, sanitasi lingkungan, banjir, perubahan iklim, deforestasi (penggundulan hutan), dan isu lingkungan lainnya. Wilayah perbatasan di Entikong yang luas dan tidak didukung oleh sarana jalan darat dan sarana komunikasi telah mengakibatkan lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam di daerah pedalaman, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara illegal dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pengamanan dan patroli patok dilakukan oleh Satgas Pamtas TNI AD, Yonif 643/Wanara sakti bekerjasama dengan TDM untuk mencegah dan menindak setiap kegiatan illegal, penyerobotan wilayah dan pengrusakan patok batas negara di sepanjang perbatasan di Kalimantan Barat dengan Serawak. Hasil patroli patok perbatasan di wilayah Entikong dalam pos Gabma Entikong dan pos Guntembawang terdiri dari 349 patok seluruh posisi kedudukan patok sudah ditemukan, tetapi ada 12 patok yang hilang dari kedudukannya dan lima patok yang rusak. Pelaksanaan pengamanan terhadap wilayah batas masih memiliki kelemahan, yaitu dari 11 jalan tradisional yang digunakan oleh masyarakat untuk menyeberang ke Malaysia dan sebaliknya hanya satu yang didirikan pos pengaman sedangkan yang lainnya belum ada pos pengaman, sehingga masyarakat dari Malaysia sewaktu waktu masuk ke wilayah Indonesia mengambil hasil hutan dan melakukan kegiatan perburuan yang dapat

menimbulkan berkurangnya jumlah flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia.

Kelima, keamanan individu, kesenjangan ekonomi yang terjadi di perbatasan Entikong menjadi pemicu terjadinya kejahatan konvensional seperti perdagangan manusia, pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila. Kejahatan tersebut merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian. Intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Selama tiga tahun terakhir ditemukan sebanyak 27 kasus *trafficking*. Berdasarkan hasil pendalaman Polsek Entikong, pelaku *trafficking* diorganisir oleh jaringan pemasuk tenaga kerja dari luar Entikong yang berkerja sama dengan jaringan penerima tenaga kerja dari Malaysia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terjadi bagi warga Entikong secara terselubung melalui jalan-jalan pelintasan tidak resmi yang kenyataan sehari-hari banyak warga masyarakat Entikong yang mencari nafkah di wilayah Malaysia. Untuk menangkal kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan di wilayah Perbatasan Polsek Entikong bekerjasama aparat yang terkait (TP4D) melaksanakan upaya mencegah *trafficking*, peredaran narkoba, DPO ke luar negeri senpi (senjata api) illegal dan kejahatan transnasional lainnya melalui pemantauan dan penegakan hukum lalu lintas orang dan barang.

Keenam, keamanan masyarakat letak geografis dan kondisi perbatasan negara yang terbuka, menyebabkan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan secara langsung maupun tidak langsung akan berhadapan dengan permasalahan kejahatan transnasional. Masih terbatasnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti jalan-jalan tradisional dan masih terbatasnya kerjasama

internasional di bidang kejahatan transnasional dapat menjadikan wilayah perbatasan Entikong sebagai ladang bagi tumbuhnya kejahatan. Untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Koramil 1204/21 Entikong dan Polsek Entikong menempatkan personel Babinsa dan Babinkamtibmas di tiap-tiap desa untuk memantau situasi di tengah tengah masyarakat. Namun karena keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi di desa khususnya di desa terpencil dan terbatasnya personel di kantor sendiri, maka personel Babinsa maupun Babinkamtibmas tidak menetap di desa, dan mereka hanya sekali sekali berkunjung untuk mengumpulkan informasi. Hal ini mengurangi intensivitas pengawasan aparat keamanan terhadap kemandirian dan ketertiban masyarakat.

Ketujuh, keamanan politik, ancaman yang dapat mengganggu kestabilan politik di wilayah perbatasan Entikong adalah munculnya sikap yang menimbulkan keraguan terhadap ideologi negara sendiri (seperti munculnya wacana mengusulkan Indonesia menjadi negara federal seperti Malaysia) adanya isu perpindahan kewarganegaraan karena alasan ekonomi dan keterbatasan sarana dan prasarana di desa asal. Dari data yang dihimpun oleh Koramil Entikong tercatat 45 orang yang telah berpindah kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara Malaysia, namun setelah di konfirmasi alasan perpindahan karena alasan perkawinan, mengikuti keluarga dan mencari pekerjaan.

Menghadapi ancaman tersebut pemerintah daerah kabupaten Sanggau melalui kesbangpol linmas bersama dengan Kodim 1204/SGU dan Polres Sanggau melakukan pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan nasionalisme melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat, ceramah di sekolah, dan kegiatan sosialisasi ke desa-desa. Di samping

itu, pengumpulan dan pengolahan informasi tentang permasalahan dan aspirasi politik masyarakat dilakukan melalui Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) Kabupaten Sanggau.

Potensi Wilayah Perbatasan

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, pemberdayaan penduduk semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara baik dari aspek militer maupun aspek sosial ekonomi melalui pemanfaatan potensi: (Susetyo: 2008)

Pertama, potensi geografi, wilayah geografis Entikong memiliki potensi yang baik untuk dijadikan daerah pertahanan, secara umum kondisi topografi wilayah Kecamatan Entikong adalah daerah perbukitan + 60% dan daerah datar +40%. Rangkaian perbukitan di sepanjang perbatasan dapat dijadikan medan kritik bagi pertahanan, sungai yang memanjang horizontal di sepanjang perbatasan dapat dijadikan rintangan, hutan hutan dan tanaman pohon dapat dijadikan lindung tembak, perkebunan dan persawahan dapat dijadikan lapangan tembak bila kesemuanya itu dikelola dengan baik, dalam hal pengelolaan tersebut diperlukan suatu keterpaduan antara aspek pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan aspek pertahanan.

Kedua, potensi sumber daya alam dan buatan, pengelolaan sumber daya alam dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan rakyat bila dikelola dengan baik, pemanfaatan lahan bila dikelola dengan intensifikasi pertanian akan dapat meningkatkan kualitas mutu hasil pertanian, tentunya harus didukung oleh sarana

parasana jalan yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi penjualan hasil pertanian, kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber logistik dan jalur distribusi logistik pertahanan. Wilayah Entikong merupakan daerah aliran sungai yang subur sangat potensial untuk industri pertanian.

Ketiga, potensi demografi. masyarakat di perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai alat pertahanan yakni menjadi mata dan telinga terhadap setiap perkembangan di lapangan berkaitan dengan masalah perbatasan. mengingat kemampuan gelar satuan TNI / polri sangat terbatas untuk mengawasi wilayah yang sangat luas. Penduduk dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan terhadap patok patok batas negara, penunjuk jalan dan tenaga bantuan operasi (TBO) dalam operasi militer maupun non militer karena mereka memahami kondisi wilayah dengan baik.

Keempat, potensi sosial ekonomi, keberadaan wilayah Entikong sebagai pintu resmi masuknya barang dan orang dapat dijadikan pusat perdagangan ekspor impor. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89% cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan pembangunan infrastruktur seperti pasar, gudang penyimpanan barang dan pelabuhan darat. Keharmonisan kehidupan masyarakat antar dua negara di perbatasan yang merupakan satu rumpun memberikan keuntungan dalam hal pertukaran informasi dan saling menjaga dan berkordinasi terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran batas negara dan keamanan kedua belah pihak.

Kendala Penyelenggaraan Pertahanan

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertahanan di wilayah

perbatasan Entikong adalah: *pertama*, keterbatasan sarana dan prasarana dasar, terbatasnya sarana dan prasarana dasar seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan telekomunikasi serta sarana perekonomian hingga saat ini mengakibatkan Kecamatan Entikong masih berstatus sebagai kawasan tertinggal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat Entikong dengan masyarakat Sarawak. Dua desa yakni Desa Pala Pasang dan Suruh Tembawang belum dapat dijangkau dengan transportasi darat (kawasan terisolir). Kedua desa tersebut masih menggunakan transportasi sungai ke Entikong, Listrik hanya bisa dinikmati masyarakat pada malam hari dengan pembangkit listrik dari air kapasitas terbatas. Sarana komunikasi seperti HP belum bisa digunakan karena belum ada sinyal, kecuali sinyal dari operator Malaysia yang dapat ditangkap pada titik-titik tertentu, siaran TV hanya bisa diterima dengan antenna parabola, satu-satunya sarana untuk memperoleh akses informasi adalah melalui siaran RRI. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki terutama dalam hal pengawasan dan pengamanan wilayah mengakibatkan masyarakat perbatasan rentan terhadap infiltrasi.

Kedua, ketergantungan ekonomi WNI di perbatasan terhadap Malaysia, ketergantungan masyarakat Kalbar di sepanjang perbatasan terhadap Sarawak sangat besar. Jarak distribusi yang jauh mengakibatkan harga barang dari Indonesia lebih tinggi dibandingkan dari harga barang dari Malaysia, apalagi barang kebutuhan pokok seperti gula yang harganya disubsidi oleh pemerintah Malaysia. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia di perbatasan lebih banyak membeli barang

di Malaysia untuk kebutuhan serhari hari, barang barang tersebut tidak dikenakan bea cukai. Masyarakat perbatasan diberikan peluang untuk berbelanja barang di Malaysia sebesar RM 600 / perbulan sesuai *border trade agreement* (BTA) hasil Kesepakatan SosekMalindo. Sebagai contoh warga Dusun Gunjemak dan Guntembawang, Desa Suruh Tembawang pada umumnya menjual hasil pertanian dan membeli kebutuhan pokok ke Kp. Sapit Malaysia, karena jarak tempuh hanya 2 km, sedangkan jarak tempuh ke Kota Entikong 42 km melalui transportasi air yang hanya bisa dilalui pada musim hujan dengan waktu tempuh sekitar 8 jam, sehingga 80% warga kedua dusun tersebut menggunakan mata uang ringgit Malaysia.

Ketiga, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sumber daya manusia yang ada pada *stakeholders* pertahanan belum memadai terutama dari segi kuantitas, di Koramil 1404-21/Entikong seharusnya ada 11 orang dan baru terpenuhi tujuh orang. Personel babinsa juga merangkap menjadi staf administrasi koramil sehingga kegiatan sehari hari lebih banyak berada di kantor koramil dan jarang berada di desa. Jumlah personel Polsek Entikong dari jumlah TOP 100 orang hanya terpenuhi 37 orang. Hal ini menyebabkan tugas tugas tidak bisa terlaksana dengan baik. Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Entikong khususnya di daerah terpencil masih sangat rendah pada umumnya hanya tamat SD, sehingga wawasan mereka tentang lingkungan masih sangat rendah, mereka melakukan kegiatan pertanian secara tradisional dengan berpindah pindah tempat. Kesadaran akan sanitasi lingkungan masih rendah.

Keempat, keterbatasan piranti lunak, koordinasi dalam pembangunan dan pembinaan

wilayah pertahanan, penyiapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan, masih terkendala dengan tidak adanya piranti lunak seperti bagaimana tanggung jawab dan mekanisme perekrutan, pendidikan/pelatihan dasar, dan pembinaan komponen cadangan, belum tersedianya petunjuk operasional bantuan kemanusiaan, petunjuk operasional penanggulangan bencana, petunjuk operasional bantuan TNI kepada pemda, akibatnya tanggung jawab penganggaran juga menjadi tidak jelas, karena dari departmen pertahanan dan TNI tidak menganggarkan, dari pemerintah daerah juga tidak menganggarkan.

Optimalisasi Penyelenggaraan Pertahanan Wilayah Dengan Pendekatan *Human Security*

Optimalisasi penyelenggaraan pertahanan dengan pendekatan human security di wilayah perbatasan Entikong merupakan salah satu paradigma yang sering diposisikan berpasangan dengan *comprehensive security* sebagai pendekatan yang memandang keamanan tidak semata-mata perspektif kemiliteran namun juga nonmiliter meliputi : (Susetyo, 2008 : Acharya, 2002)

Pertama, keamanan ekonomi ditunjukkan kepada upaya menjamin akses untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi warga negara, Wilayah perbatasan Entikong merupakan wilayah strategis, dari perspektif eksternal, wilayah perbatasan Entikong adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif bagi diplomasi Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian masyarakat menjadi prasyarat bagi kokohnya ketahanan wilayah

negara di perbatasan. Upaya menghilangkan ketergantungan ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan Entikong terhadap Malaysia dalam kerangka sosekmalindo dengan mengembangkan perinsip “*selling rather than buying*” dengan cara memproduksi barang-barang yang dapat dipasarkan ke Malaysia. Saat ini hasil produksi pertanian di Entikong yang menjadi komoditi perdagangan dan ekspor antara lain lada (*piper nigrum*) 21 Ton/tahun, karet (*Hevea brasiliensis*) 1,6 Ton/tahun, kopi (*coffea*) 3,5 Ton/tahun, dan coklat (*Theobroma cacao*) 7.5 ton/ tahun. Komoditi ekspor tersebut dapat dimaksimalkan bila di Entikong terdapat jaringan jalan distribusi dan pelabuhan darat yang dapat menampung hasil produksi pertanian tersebut, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat melalui Badan pengelola dan kerja sama perbatasan propinsi sudah merintis dan mengusulkan pembangunan jalan koridor/ paralel perbatasan sepanjang perbatasan sepanjang ± 966 Km mulai dari Temajok–Aruk–Jagoi, Babang–Entikong–Balai, Karangany–Senaning–Nanga Badau–Putussibau, tetapi sampai saat ini realisasinya baru sampai pada tahap penyiapan lahan sepanjang 23 Km dan pembuatan jalan tanah sepanjang 10,2 Km yang masih terputus-putus karena belum ada jembatan pada pelintasan sungai. Pembangunan jalan diikuti dengan pembangunan perkebunan di sepanjang garis perbatasan seluas 5 Ha/KK untuk kesejahteraan dan juga dapat menekan ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga dengan memberikan lapangan usaha baru bagi warga negara yang saat ini banyak yang bekerja secara illegal di Serawak. Ditinjau dari aspek pertahanan militer, daya dukung dan ketersediaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung tugas

Kodim 1204/ Sanggau dan Satgas Pamtas Korem 121/ABW dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan patroli pengamanan Jalan merupakan urat nadi distribusi pasukan dan logistik serta patroli pengamanan wilayah darat ke titik-titik pos dan sasaran di sepanjang perbatasan. Wilayah perbatasan Entikong dikembangkan sebagai wilayah perdagangan (*border trade centre*) dan sepanjang poros jalan paralel dikembangkan menjadi daerah pertanian dan perkebunan dalam konsep agro belt yang merupakan pengembangan dari *safety belt* dalam konsep sebelumnya. Untuk memacu pertumbuhan sektor pariwisata dan industri, upaya diplomasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempromosikan produk-produk industri dan wisata di wilayah perbatasan kepada negara-negara terdekat yang memiliki potensi perdagangan dan wisata Kalimantan ke Malaysia dan Brunai Darussalam sesuai dengan konsep menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Negara, maka Kecamatan Entikong dirancang sebagai *Border Development Centre* (BDC), yaitu kawasan strategis yang memiliki potensi untuk pemusatan kegiatan ekonomi baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan sekitarnya. Untuk mewujudkan hal di atas maka harus segera diwujudkan pembangunan sarana prasarana seperti *duty free shop, marketing point*, perkantoran, lapangan golf dan villa, lapangan olahraga, sarana rekreasi, kawasan industri besar menengah kecil, terminal penumpang, dan barang rumah sakit tipe C. Upaya menjadikan kecamatan Entikong sebagai *border development centre* bukan merupakan suatu hal yang berlebihan karena sampai dengan tahun 2010 pos lintas batas Entikong telah menghasilkan devisa ekspor sebesar US\$ 3,434,879.51 / tahun atau

senilai dengan Rp 34.348.795.100,00 (*Tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus ribu rupiah*) / tahun. Penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 12.163.284.959,00/ (*Dua belas milyar seratus enampuluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*) tahun.

Kedua, keamanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi, dan harga yang terjangkau. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Hal di atas diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi, dan sub sistem konsumsi. Oleh karena itu, program peningkatan keamanan pangan di wilayah Entikong dilakukan melalui peningkatan produksi, sistem distribusi, dan penataan konsumsi/pemasaran. Kapasitas produksi hasil pertanian saat ini di Entikong meliputi padi (*Oryza sativa*) sawah 1.524 Ton/tahun dengan rata rata produksi 4.2 Ton/Ha. padi (*Oryza sativa*) ladang 2.478 ton/tahun dengan rata rata produksi 1 Ton/Ha, jagung (*Zea mays*) 2.5 Ton/thn. Kacang tanah (*Arachis hypogaea*) 1 Ton/tahun. kacang panjang (*Phaseolus vulgaris*) 12 Kw/Ha. terong (*Solanum melongena*) 1.5 Ton / tahun. Hasil peternakan masyarakat berupa peternakan sapi (*Bos Taurus*) 195 ekor dari 32 peternak, 20 kambing peternak (*Capra Aegagrus Hircus*) dari 9 peternak, 1.350 babi (*Artamus leucorynchus*) dari 615 peternak 5340 ekor ayam (*Gallus domesticus*) dari 1300

peternak. Kapasitas produksi tersebut belum mendukung untuk menciptakan ketahanan pangan yang mandiri yakni tercapainya ketersediaan pangan masyarakat yang cukup, baik dalam situasi normal maupun dalam keadaan gagal panen dan bencana alam. Upaya pemerintah daerah meningkatkan keamanan pangan di wilayah perbatasan Entikong dilaksanakan melalui peningkatan mutu intensifikasi dalam bentuk usaha peningkatan produktivitas dengan penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pengetahuan, dan ketrampilan petani dalam rangka penerapan teknologi spesifik lokasi. Perluasan areal tanam (ekstensifikasi) yang dilaksanakan dalam bentuk pengairan serta perluasan lahan dan peningkatan indeks penanaman melalui percepatan pengolahan tanah, penggarapan lahan tidur dan terlantar, mengubah pola pikir masyarakat dari pola berladang berpindah menjadi pola menetap. Peningkatan usaha peternakan dan perikanan dilakukan dengan mendorong usaha peternakan komersial dan perikanan air tawar dengan memanfaatkan sungai Sekayam.

Ketiga, jaminan kesehatan. warga negara di wilayah perbatasan pada umumnya sudah memiliki kartu askes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi menjadi masalah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat. Bagi masyarakat yang mampu lebih memilih berobat di Sirean Malaysia karena disamping fasilitas lebih lengkap juga faktor jarak yang lebih dekat serta didukung oleh infrastruktur jalan yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan jalan menuju kota Kabupaten Sanggau. Pembangunan fasilitas kesehatan dan penyiapan tenaga kesehatan merupakan kebutuhan yang mutlak dipersiapkan pemerintah daerah di

setiap desa yang secara geografi letaknya jauh dari kota kecamatan untuk melakukan evaluasi kesehatan bagi masyarakat, pelayanan KB dan Posyandu. Sejauh ini di setiap desa hanya ada satu bidan desa, belum mengkaver penilaian status kesehatan masyarakat. Wilayah perbatasan Entikong sebagai pintu masuk orang dan hewan dari negara asing ke Indonesia, memungkinkan menjadi pintu masuknya obat-obatan terlarang dan wabah penyakit menular yang berasal dari luar negeri seperti HIV dan malaria, oleh karena itu di Entikong dioperasikan Kantor Karangtina Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk menangkal kemungkinan masuknya penyakit dan obat-obatan terlarang dari luar. Upaya penanggulangan ancaman telah dilakukan antara pemerintah Kalimantan Barat dengan pemerintah negeri Serawak dituangkan dalam kertas kerja, di antaranya adalah melakukan simulasi bersama penanganan pandemik Influenza pada tahun 2011 di Entikong dan Tebedu. Perkongsian maklumat (pertukaran informasi) terhadap produk yang tidak berdaftar di Malaysia dan produk-produk yang dirampas/ dilarang memasuki negara masing-masing kerana mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan.

Keempat, keamanan lingkungan, wilayah perbatasan di Entikong yang luas dan tidak didukung oleh sarana jalan darat dan sarana komunikasi telah mengakibatkan lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam di daerah pedalaman, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara illegal berupa illegal logging yang mengakibatkan kerugian negara. Berdasarkan spektrum ancaman tersebut maka penyelenggaraan pertahanan

di perbatasan Entikong dioptimalkan oleh pemerintah kabupaten sanggau dengan memperhatikan isu-isu lingkungan hidup dan keamanan lingkungan, yang patut dijadikan sebagai sumber informasi yang penting untuk mengatasi persoalan yang mendesak seperti sanitasi lingkungan, banjir, perubahan iklim, deforestasi (penggundulan hutan), dan isuisu lingkungan lainnya. Penyelesaian pemasalahan lingkungan kedua negara dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan yang merupakan bagian dari penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia. Sumber sengketa yang memungkinkan terjadi di wilayah perbatasan Entikong selama ini adalah *functional dispute* yaitu sengketa karena pergerakan barang dan orang karena tidak terjaga ketat, dan *transboundary resource dispute* yaitu sengketa yang disebabkan eksplorasi sumber daya alam oleh negara lain yang merugikan negara lainnya (Rahmawati, 2010: 91). Jika upaya kerjasama dan diplomasi tidak maksimal maka persoalan *overlapping claims* teritorial dengan negara tetangga bisa terjadi. Untuk mengatasi keterbatasan petugas keamanan dalam melaksanakan pengawasan lingkungan, maka aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan dalam melaksanakan pengawasan, mereka diberikan pemahaman mengenai pentingnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini BNPP dan pemerintah Propinsi Kalimantan Barat perlu berkoordinasi pemerintah Malaysia untuk bersama-sama memasang kembali 12 patok yang hilang, dan lima yang rusak di perbatasan Entikong. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan patok patok perbatasan negara perlu diikutsertakan sehingga masyarakat dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi,

letak dan jumlahnya sehingga memperkecil kemungkinan adanya pergeseran, kerusakan dan hilang. Pembangunan pos pos pengaman yang baru di pelintasan 11 jalan tradisional perlu segera dibangun untuk mengawasi lalu lintas orang dan barang serta kegiatan masyarakat yang melalui batas Indonesia-Malaysia.

Kelima, keamanan individu, kerawanan yang paling penting diwaspadai di wilayah perbatasan Entikong adalah munculnya organisasi, kelompok dan jaringan yang bertujuan mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain seperti munculnya jaringan peredaran narkoba yang selalu mencari pangsa pasar baru dari kalangan generasi muda, jaringan penjualan manusia (*trafficking*) untuk menjadi PSK di tempat tempat hiburan dan pembantu rumah tangga di Malaysia. melalui pengiriman TKI ilegal dengan menggunakan visa kunjungan (wisata). Modus operandi kejahatan trafficking bermacam macam yaitu penculikan anak-anak dan gadis remaja, bujuk rayu untuk menjadi PRT buruh migran dan WTS, jeratan hutang /jasa, duta budaya, adopsi ilegal, penipuan dan pemalsuan identitas serta kawin pesanan. Kelompok individu yang rawan menjadi korban trafficking adalah perempuan dan anak dari keluarga miskin, perempuan dan anak dengan pendidikan rendah. anak-anak putus sekolah, korban kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), para pencari kerja dan janda cerai akibat pernikahan dini. Dalam rangka menghadapi ancaman terhadap kejahatan individu pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Kesbangpol Linmas melakukan program sosialisasi strategi penanggulangan imigran gelap/illegal bekerjasama dengan *International For Immigration* (IOM) Kalimantan Barat di

Kecamatan Entikong pada 18 Pebruari 2012, diikuti oleh pejabat Muspika beserta staf, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda/pelajar, LSM, dan organisasi wanita. Partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Entikong ditunjukkan melalui kegiatan LSM Anak Bangsa. LSM ini merupakan lembaga yang secara khusus bekerja di bidang advokasi TKI bermasalah, hingga Mei 2012. sudah 103 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak Bangsa Entikong.

Keenam, keamanan masyarakat, letak geografis dan kondisi perbatasan Negara yang terbuka, menyebabkan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan secara langsung maupun tidak langsung akan berhadapan dengan permasalahan kejahatan transnasional. Untuk mengatasi terbatasnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti jalan jalan tradisional maka dilakukan penyertaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan masyarakat di wilayah Entikong dengan cara; keluhan-keluhan masyarakat tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat ditampung di kepala dusun dan dilanjutkan secara berjenjang, bila terjadi keadaan yang sangat genting maka masyarakat laporan langsung kepada aparat keamanan di kecamatan dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia, melaksanakan diskusi dan saling tukar informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kunjungan Babinkamtibmas dan Babinsa ke desa, dan masyarakat membantu dalam mengawasi kegiatan orang-orang asing yang melintas atau melakukan aktivitas di

wilayahnya. Meskipun di beberapa wilayah pasca-konflik di Kalimantan Barat, masih ditemui berbagai upaya untuk mendorong terjadinya konflik komunal, tetapi di wilayah Kecamatan Entikong berkat kerjasama yang baik antara tokoh masyarakat dan pemuka agama dan didukung aparat Koramil Entikong dan Polsek Entikong dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal telah mampu meredam potensi konflik sehingga tidak muncul ke permukaan.

Ketujuh, kestabilan politik, instabilitas politik di wilayah perbatasan

bisa menjadi cerminan kelemahan sistem politik negara Indonesia bagi negara tetangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kestabilan politik, maka pemenuhan akan hak hidup yang layak, penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan kebebasan berbicara dalam berpolitik harus ditegakkan dalam batas batas norma etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah daerah bersama dengan jajaran muspida aktif dalam mengendalikan tindakan tindakan dalam rangka praktek politik seperti pengerahan massa dan kampanye sehingga tetap dalam batas batas yang tidak mengganggu hak hak orang lain dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam rangka pembinaan kesadaran politik masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Kesbangpol Linmas melaksanakan program sosialisasi wawasan kebangsaan di Entikong, pada tanggal 16 Nopember 2011, diikuti oleh Kades, ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Regulasi pemerintah pusat dalam pemberlakuan hukum keimigrasian harus memperhatikan kearifan lokal seperti kebiasaan transaksi perdagangan masyarakat

yang tradisional, tradisi kunjungan keluarga dan kunjungan adat antar dua masyarakat yang berbeda negara.

Kontribusi Penyelenggaraan Pertahanan Wilayah Perbatasan Terhadap Ketahanan Wilayah

Kontribusi penyelenggaraan pertahanan wilayah perbatasan terhadap ketahanan wilayah sebagai berikut: *Pertama*, kontribusi terhadap ketahanan ideologi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang telah berupaya memberikan perhatian terhadap upaya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Entikong yang diperkuat dengan pembinaan teritorial jajaran Kodim 1204/Sanggau secara perlahan mengembalikan kondisi sikap nasionalisme dari sikap yang menimbulkan keraguan terhadap idiologi negara sendiri (seperti munculnya wacana mengusulkan Indonesia menjadi negara federal seperti Malaysia) menuju sikap nasionalisme yang sadar diri sebagai bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan mengurangi keinginan masyarakat untuk berpindah kewarganegaraan karena alasan ekonomi dan infrastruktur. Walaupun kondisi sikap nasionalisme menurut hasil riset Manto Saidi (2009) menunjukkan 63%-78% masih rendah, tetapi ada perubahan wawasan nasionalisme ke arah yang lebih baik.

Kedua, kontribusi terhadap ketahanan politik. penerapan otonomi daerah semakin membuka kesempatan terpenuhinya aspirasi politik masyarakat berupa kepemimpinan daerah oleh putra daerah. Aspirasi tersebut semakin kuat disuarakan oleh kelompok masyarakat Entikong menunjukkan besarnya keinginan masyarakat untuk menciptakan

suatu pemerintahan yang memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat perbatasan. Upaya pemerintah dan stakeholders pertahanan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat wilayah perbatasan dengan pendekatan *human security* dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat ketahanan politik wilayah perbatasan Entikong.

Ketiga, kontribusi terhadap ketahanan ekonomi. Kebijakan pemerintah mengalihkan perhatian ke wilayah perbatasan dengan memulai pembangunan beberapa infrastruktur dasar dan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan melalui pembangunan sarana pendidikan (BLK) dan sarana perekonomian seperti pasar, jalan, dan listrik memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi wilayah berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2005 menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 5% bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,89% jauh di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau 4,95%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, peningkatan sarana infrastruktur dasar (jalan darat, sumber tenaga listrik, dan sarana komunikasi) secara bertahap, peningkatan produksi pertanian melalui pembuatan lahan sawah dan pembukaan lahan perkebunan, perikanan air tawar, dan promosi kunjungan wisata.

Keempat, kontribusi terhadap ketahanan sosial budaya, pemerintah daerah bersama stakeholders pertahanan lainnya menggunakan pendekatan adat dalam penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat misalnya bila terjadi

sengketa lahan diselesaikan melalui musyawarah adat, kasus asusila (perzinaan) diselesaikan dengan membayar denda adat, perkelahian yang mengakibatkan keluar darah harus dibayar dengan denda adat. Denda adat ditetapkan melalui keputusan dewan adat dapat berupa tempaya kuno yang sudah langka, beras, babi (*Artamus leucorhynchus*), ayam (*Gallus domesticus*). Sejauh ini adat masih memegang peranan penting dalam penyelesaian perselisihan sehingga banyak permasalahan yang terjadi tidak berlanjut pada proses hukum. disamping itu ketaatan masyarakat terhadap adat istiadat mengurangi peluang masyarakat untuk berbuat kesalahan yang merugikan orang lain. Pendekatan sosial budaya dalam penegakan hukum di wilayah Entikong memberikan kontribusi terhadap ketertiban hukum, dan menekan tindak kejahatan di masyarakat.

SIMPULAN

Lembaga pertahanan di wilayah perbatasan Entikong terdiri dari unsur Kodim 1204/SGU, Satgas Pamtas, unsur Polres Sanggau, dan Pemerintah Kabupaten Sanggau didukung oleh kelembagaan pusat yang berada di Entikong kondisi penyelenggaraan pertahanan di wilayah perbatasan Entikong belum optimal yakni masih ada kelemahan seperti kurangnya pengawasan terhadap beberapa daerah terpencil, lalu lintas barang dan orang melalui jalan-jalan tradisional belum bisa ditertibkan dan pelibatan masyarakat dalam pertahanan wilayah masih kurang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana dasar (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), ketergantungan ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan terhadap Malaysia, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan piranti lunak tentang

penyelenggaraan pertahanan non-militer tentang mekanisme penyiapan, pembinaan, pengerahan rakyat sebagai tenaga cadangan, dan pendukung pertahanan.

Optimalisasi penyelenggaraan pertahanan wilayah perbatasan negara di Kecamatan Entikong, dilaksanakan dengan memaksimalkan kinerja kelembagaan pertahanan non-militer, dengan strategi pembangunan dan pengadaan infrastruktur dasar (transportasi darat, listrik, air bersih, dan telekomunikasi) untuk mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah batas. pembangunan ekonomi wilayah Entikong untuk meminimalisasi ketergantungan ekonomi. Perlindungan terhadap keamanan pribadi dan masyarakat dari tindak kejahatan dan kegiatan illegal, pengamanan, dan pelestarian lingkungan, dan pembinaan stabilitas politik melalui pembinaan nasionalisme serta kesadaran bela negara. Strategi pembangunan tersebut di atas memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan wilayah. Berupa peningkatan sikap nasionalisme masyarakat perbatasan Entikong, peningkatan pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya stabilitas politik serta keamanan di wilayah perbatasan serta terpeliharanya keharmonisan dalam kehidupan sosial budaya, dan toleransi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav & Steve Smith. 2002. *"The Concept Of security before and after September 11"* Institute Of Defence And Strategic Studies: Singapore.
- Armawi, Armaidly. 2011. *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Basrie, Chaidir. 2008. *"Teori Ketahanan Nasional, Gagasan, Proses Kajian. dan*

pengembangannya". Yogyakarta: SPS UGM.

- Susetyo, Heru. 2008. *"Menuju paradigma Keamanan Kemprehensif berspektif Human security dalam kebijakan Keamanan Nasional Indonesia"* Jakarta: Lex Jurnalica vo.6.
- Rahmaniah, Erna. 2009. *"Strategi pmbangunan dan Pemb perdayaan Masyarakat Perbatasan dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat (community-security)"*, [http://humansecuritykamananmanusiablogspot.com/diaksespada Nopember 2011](http://humansecuritykamananmanusiablogspot.com/diaksespadaNopember2011)).
- Rahmawati, Iva. 2010. *Diplomasi perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI, (Mengelola perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Issu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan)*, Yogyakarta: Graha ilmu
- Simbolon, Cornel. 2009. *"Pemberdayaan masyarakat Dalam rangka mengaman-(Studi kasus propinsi Kalimantan Barat)"*. Yogyakarta: Tesis. Ketahanan nasional UGM.
- Sunaryadi. Strategi Pemberdayaan Potensi Wilayah Perbatasan Untuk Menunjang Pertahanan dan Keamanan NKRI, <http://www.scribd.com/doc/98049896>.
- Wahyudi, Agus,. 2009. *"Strategi Menghadapi Ancaman Wilayah Perbatasan Darat, Studi Kausus Daerah. Jurnal Ketahanan Nasional. XIX (1). April 2013 Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kab. Bengkayang Kalimantan Barat"*, Tesis, S2 Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta.
- Widarto, Muh. Arif. Strategi Pertahanan Wilayah Perbatasan Indonesia, <http://www.tandef.net>, Diakses pada Juli 2012